

Abstrak

Perceraian di bawah tangan yaitu perceraian yang dilakukan tanpa pencatatan resmi di Pengadilan Agama. Hal ini terjadi pada masyarakat Kecamatan Tanjung Lubuk, yang menimbulkan berbagai permasalahan hukum, terutama dalam hal penentuan hak asuh anak. Tanpa adanya putusan pengadilan yang sah, status perceraian menjadi tidak jelas dan berdampak pada kepastian hukum bagi anak, khususnya terkait hak asuh anak di Kecamatan Tanjung Lubuk Kabupaten OKI. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan hak asuh anak dalam kasus perceraian di bawah tangan serta meninjau kesesuaiannya dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 105, 115, dan 156. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan pendekatan normatif dan sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceraian yang tidak dicatat secara resmi menyebabkan ketidakpastian hukum yang menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaan hak asuh anak. Seperti Perebutan hak asuh anak, Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) di ambil secara sepihak, dan hubungan anak dengan orang tua tidak baik. Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terhadap Hak Asuh Anak di Kecamatan Tanjung Lubuk yaitu Perceraian di bawah tangan tidak sah secara hukum sehingga menimbulkan beberapa masalah yaitu meliputi, ketidakpastian dalam penentuan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*), kewajiban pemeliharaan dan pendidikan tidak terjamin, dan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) tidak memiliki kepastian hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencatatan resmi perceraian sangat perlu, serta peran Pengadilan Agama dan lembaga terkait harus diperkuat guna melindungi hak-hak anak dari dampak negatif perceraian di bawah tangan.

Kata Kunci: Hak Asuh Anak, Perceraian di Bawah Tangan, Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama, Perlindungan Hukum

Abstract

Unregistered divorce, which refers to divorce conducted without official registration at the Religious Court, occurs within the community of Tanjung Lubuk District and creates various legal issues, particularly in determining child custody. Without a valid court decision, the status of the divorce becomes unclear, which affects legal certainty for children, especially in terms of custody rights. In many cases, mothers lose custody that should rightfully belong to them, while fathers often neglect their obligation to provide financial support. The research problems in this study are: how is the implementation of child custody rights following unregistered divorce in Tanjung Lubuk District, and how is this practice viewed from the perspective of Islamic law? The purpose of this research is to examine the practice of child custody after unregistered divorce and to assess its accordance with the provisions of the Compilation of Islamic Law (KHI), particularly Articles 105, 115, and 156.

This research uses a qualitative approach with field research as its type. Data were collected through interviews, observations, and documentation, and analyzed descriptively and qualitatively using normative and sociological approaches. The results show that unregistered divorce leads to legal uncertainty in the implementation of child custody. This includes: child custody disputes, unilateral custody claims, and poor relationships between children and their parents. The absence of a valid court ruling also hinders children's access to legal protection and their fundamental rights. Therefore, public awareness about the importance of officially registering divorce must be improved, and the role of the Religious Court and related institutions should be strengthened in protecting the rights of children affected by unregistered divorce.

Keywords: Child Custody, Unregistered Divorce, Compilation of Islamic Law, Religious Court, Legal Protection.